

DARI MODERNITAS HINGGA POLIGAMI : PEMIKIRAN ANI IDRUS

Suriani

LAIN Bukittinggi
E-mail : suriani@gmail.com

<i>Diterima : 11 April 2018</i>	<i>Direvisi : 12 April 2018</i>	<i>Diterbitkan : 30 Juni 2018</i>
---------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------

Abstract

The opportunity to get education for Indonesian women in the early 20th century had an impact on increasing women's activities in the fields of press, social, economic and political. Women with their thoughts present provide their own color in various aspects of life at that time. One of these women is Ani Idrus. By her writings, she conveyed about life modernity and problems faced by Indonesian women in Dutch colonial period which still exist today.

Keyword : *Modernity, Polygamy, Thought of Ani Idrus*

Abstrak

Terbukanya kesempatan untuk mendapatkan pendidikan bagi perempuan Indonesia pada awal abad 20 berdampak pada peningkatan aktivitas perempuan dalam bidang pers, sosial, ekonomi dan politik. Perempuan dengan pemikirannya hadir memberikan warna tersendiri dalam berbagai aspek kehidupan saat itu. Salah satu perempuan tersebut adalah Ani Idrus. Melalui tulisannya, ia menyampaikan tentang modernitas dan persoalan-persoalan hidup yang dihadapi perempuan Indonesia pada masa kolonial Belanda yang masih juga ada hingga saat ini.

Kata Kunci : Modernitas, Poligami, Pemikiran Ani Idrus

Pendahuluan

Kongres Perempuan Pertama di Yogyakarta pada 1928 menjadi momen penting dalam sejarah pergerakan perempuan di Indonesia. Salah satu hasil Kongres tersebut adalah menuntut penambahan jumlah sekolah untuk perempuan, hal ini menjadi sebuah langkah awal dalam mengembangkan status sosial perempuan. Bertambahnya jumlah sekolah untuk perempuan menghasilkan banyak perempuan yang berpendidikan. Hal ini tak terlepas dari pemberlakuan Politik Etis pada awal Abad 20. Pendidikan yang diberikan pada perempuan menumbuhkan kesadaran kebangsaan mereka dan membawa mereka untuk berpartisipasi pada organisasi politik pergerakan. Ini menunjukkan bahwa aktifitas perempuan tidak lagi sebatas pada urusan rumah tangga saja.

Kemunculan perempuan dalam bidang politik, ekonomi, sosial dan juga pers tidak hanya terjadi di Jawa saja, tetapi juga di daerah lainnya di Indonesia, termasuk Sumatera Barat. Pada awal abad 20, di Sumatera Barat Rohana Kudus hadir dengan “Amal Setia” dan “Soenting Melayu”nya dan Rahma el Yunusiah dengan “Diniyah Putri”. Selain itu ada juga Rasuna Said, sedangkan di Sumatera Timur (Medan) muncul Ani Idrus.

Ani Idrus, seorang perempuan berdarah minang yang lahir di Sawahlunto pada 25 November 1918. Ia tinggal di lingkungan para pekerja tambang karena ayahnya adalah salah satu pegawai di tambang batubara Ombilin Sawahlunto. Kehidupan di wilayah tambang pada masa itu tidaklah mudah, karena adanya startifikasi masyarakat yang muncul karena jabatan-jabatan mereka di

pabrik tambang sering menimbulkan persaingan dan konflik.

Ani Idrus disekolahkan ayahnya ke sekolah negeri di Sawahlunto, selain itu juga ia diwajibkan untuk mengaji di surau pada sore hari setelah waktu shalat ashar sampai setelah maghrib. Setelah usia 11 tahun, Ani Idrus pindah ke Medan dibawa oleh ibunya yang bercerai dengan Ayahnya dan melanjutkan sekolah di *Methodist Girl School*, kemudian berpindah sekolah ke sekolah khusus perempuan, Meisjes Kopschool sampai tamat dan melanjutkan sekolah di Taman Siswa.¹ Di Medan, Ibu Ani Idrus menikah lagi dan beruntung bagi Ani Idrus bahwa ayah tirinya adalah orang yang suka membaca, sehingga ia berlangganan majalah dan surat kabar. Dengan tersedianya surat kabar dan majalah di rumahnya, Ani Idrus tumbuh menjadi anak yang rajin membaca dan suka menulis.

Saat di Sawahlunto, Ani Idrus hidup dalam balutan budaya Minang yang ketat dengan segala aturan-aturan adat yang harus dipatuhi. Sejak kecil Ani Idrus sudah menunjukkan sikap kritisnya, hal pertama yang sangat tidak disetujuinya adalah perlakuan ayahnya terhadap ibunya. Ayahnya adalah bagian dari laki-laki Minang kebanyakan, yang melakukan poligami. Keadaan dan pengalaman yang dirasakannya, baik di Sawahlunto dan di Medan tersebutlah yang kemudian melahirkan tulisan-tulisannya di majalah dan surat kabar.

Menjadi Bagian Dari Modernitas

Politik etis yang dilaksanakan pada 1901 dianggap sebagai simbol modernisasi di Hindia Belanda. Hal tersebut karena unsur-unsur dalam Politik Etis itu sendiri, terutama edukasi (pendidikan). Poeze mengartikan Politik Etis sebagai kebijakan yang diarahkan untuk meletakkan seluruh kepulauan

¹ Tridah Bangun. *Hajah Ani Idrus : Tokoh Wartawati Indonesia*. (Jakarta : CV. Haji Masagung, 1990)

Indonesia di bawah kekuasaan Belanda secara nyata, dan untuk mengembangkan negeri dan bangsa di wilayah itu ke arah pemerintahan sendiri di bawah pimpinan Negeri Belanda menurut model Barat. Politik Etis mengusahakan agar orang Indonesia berhubungan dengan budaya dan pendidikan Barat.²

Sistem pendidikan Barat³ yang dilaksanakan merupakan perwujudan politik asosiasi⁴. Dalam perkembangannya, sistem pendidikan Barat ini akhirnya membawa perubahan pada citra perempuan Indonesia. Perempuan mulai mendapatkan ruang gerak yang lebih luas, dan mulai berpikir tentang dirinya dan kemajuan golongannya. Sebelum itu, perempuan Indonesia dibelenggu dengan aturan-aturan tradisi dan adat yang cenderung membatasi peran mereka dalam kehidupan masyarakat. Kaum perempuan Indonesia lebih banyak hanya berperan sebagai ibu rumah tangga dan sebagai pelayan suami di rumah.

Pada dekade pertama abad ke-20 sudah ada puluhan sekolah di Sumatera Utara yang telah memberi kesempatan kepada kaum perempuan bersekolah.⁵ Di samping itu

² Harry A. Poeze (Ed.). 2008. *Di Negeri Penjajah: Orang Indonesia di Negeri Belanda 1600-1950* (terj.) Jakarta: KPG dan KITLV-Jakarta, hal 25

³ Awalnya, pendidikan Barat tidak mendapat kerjasama dan kadang-kadang mendapat tantangan dari pihak orang tua. Mereka khawatir jika pendidikan Barat mempengaruhi masalah status dan kedudukan anak-anak mereka. Juga mereka takut kalau hal tersebut malah memberi banyak kecelakaan daripada kebaikan. Lebih lengkap pengaruh pendidikan Barat terhadap masyarakat lihat dalam. Robert Van Neil, *Munculnya Elit Modern Indonesia*. (Jakarta : Pustaka Jaya. 2009)

⁴ Politik Asosiasi menginginkan kebudayaan kota memakmurkan dan mensejahterakan penduduk. Robert Van Neil, *ibid*. Politik asosiasi kemudian melahirkan kaum asosianis yang menginginkan supaya antara penjajah dan yang dijajah bertindak sebagai teman sehingga rintangan yang berupa perbedaan ras dapat dilenyapkan. Sartono Kartodirdjo, *Pengantar Sejarah Indonesia Baru : Sejarah Pergerakan Nasional*. (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama. 1999). hlm. 50

⁵ Daniel Perret, *Kolonialisme dan Etnisitas, Batak dan Melayu di Sumatera Timur*. Terj.Saraswati Wardhany.

pendidikan Islam juga berkembang sejak akhir abad ke-19, ia terutama digerakkan oleh orang Minangkabau dan Mandailing yang juga memberikan kesempatan kepada kaum perempuan. Pendidikan menjadi kunci bagi perempuan untuk keluar dan berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan yang sebelumnya tertutup untuk mereka, seperti bidang pers dan politik.

Modernitas yang masuk di wilayah-wilayah Hindia Belanda menyebabkan perubahan secara menyeluruh baik struktural, psikologis, politis, sosial, ekonomi dan budaya. Masyarakat mulai menampilkan simbol-simbol modernitas baru hasil adaptasi dari Barat, baik dalam cara berpakaian, gaya hidup dan pergaulan.

Tidak semua perubahan-perubahan yang terjadi akibat modernisasi sesuai dengan norma, adat dan kebiasaan hidup masyarakat bumiputera. Ada beberapa hal yang bisa dan tidak bisa diikuti. Perempuan sebagai media masuknya modernisasi harus mampu menyesuaikan diri dengan keadaan tersebut. Namun, menyesuaikan diri dengan kemodernan dan kemajuan saat itu bukan sekedar menunjukkan sikap selalu mengikuti trend, pergaulan, gaya hidup dan gaya berpakaian ala Barat, harus lebih dari itu.

*“Kita (perempoean) baroes madjoe, modern, tetapi modern jang tidak meroesakkan”*⁶

Kutipan tulisan tersebut adalah kutipan dari tulisan Ani Idrus yang terbit dalam *Seruan Kita* pada April 1940. Dalam tulisannya Ani Idrus dengan jelas mengajak perempuan untuk memodernkan dan

memajukan dirinya, namun kemodernan yang sesuai dengan norma, nilai, adat kesopanan dan kebiasaan orang Timur.

Perempuan yang modern harus menunjukkan kecantikan sikap dan tingkah lakunya yang sesuai dengan adat kesopanan Timur. Perempuan tidak boleh hanya berpikiran untuk kepentingan dirinya sendiri dengan mempercantik wajah dan penampilannya, tetapi juga harus memiliki kesadaran bahwa dirinya berguna bagi bangsa dan tanah airnya.⁷ Perempuan modern yang terpelajar dan terdidik inilah yang dapat diharapkan mampu memperbaiki nasib perempuan-perempuan lainnya.⁸ Dengan kemodernan yang dimiliki perempuan, ada tanggung jawab besar yang harus mereka laksanakan. Akan tetapi yang terjadi malah sebaliknya. Tanggung jawab yang seharusnya mereka laksanakan mereka tinggalkan.

Ani Idrus melihat bahwa banyak perempuan dengan kemodernan yang mereka miliki merasa bangga atas pakaian ala Barat mereka, yang notabene melanggar adat kesopanan Timur. Keadaan tersebut tidak hanya dilihat Ani Idrus di Medan, ia juga melihat keadaan yang sama ketika ia mengunjungi ayahnya ke Sumatera Barat. Mereka berpakaian dan berhias layaknya perempuan Barat.⁹ Ia menyayangkan hal tersebut, karena Sumatera Barat dikenal sebagai daerah basis Islam yang kuat. Perempuan memang harus maju dan modern, tetapi modern yang tidak merusakkan.¹⁰ Kesampingkan dulu segala mode atau segala

⁷ *ibid*

⁸ Ani Idrus. *Poetri Zaman Sekarang*, dalam *Seruan Kita* 29 September 1939, hlm. 226

⁹ Ani Idrus. *Mode Barat dan Poetri Timoer di Sumatera Barat*. Dalam *Seruan Kita* No. 31 Thn. 2, 23 Februari 1940, hlm. 698

¹⁰ Ani Idrus. *Kemodernan Perempuan Membawa Bencana? Bencana?* *Seruan Kita* No. 37, Th.2, 5 April 1940, hlm. 796

Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2010, hlm. 259-269. Berdasarkan sensus pada tahun 1930 sudah ada banyak 156.864 perempuan yang tidak buta huruf di Sumatera. Lihat *Indisch Verslag*, 1940, hlm. 126. Para perempuan itu menjadi penggerak utama kemajuan, mereka melibatkan diri dalam pendidikan, organisasi dan kewartawanan.

⁶ Ani Idrus. *Kemodernan perempuan membawa bencana?* *Seruan Kita* No. 37, Th.2, 5 April 1940, hlm. 796

segala kesenangan berplesir, utamakan berjuang untuk kemajuan bangsa dan tanah air. Jika hal tersebut sudah tercapai barulah bisa memikirkan hal tersebut.¹¹

Ani Idrus menganggap bahwa kemodernan yang dibawa oleh Barat tidak sepenuhnya memberikan pengaruh yang negatif. Masyarakat, terutama perempuan harus mampu menyesuaikan kemodernan Barat yang mereka serap dan terapkan agar tetap selaras dengan kesopanan ala Timur.¹² Dengan kemodernan yang dibawa oleh Barat, perempuan Indonesia dapat menikmati pendidikan dan menjadikan beberapa diantara mereka sebagai golongan intelektual yang kemudian berperan dalam perjuangan bangsa.

Perempuan memang sudah mendapat kesempatan untuk keluar dari rumah, namun nilai-nilai dan norma dalam masyarakat serta pandangan masyarakat masih membatasi mereka. Perempuan masih dipandang tidak mampu melakukan pekerjaan yang biasanya dikerjakan laki-laki. Ani Idrus memiliki pandangan yang sama dengan masyarakat kebanyakan soal pekerjaan bagi perempuan, yaitu bahwa perempuan memiliki keterbatasan, sehingga pekerjaan buat mereka juga terbatas. Dalam tulisannya, Ani Idrus menjelaskan bahwa dengan keterbatasan kekuatan yang dimiliki perempuan, ada beberapa pekerjaan yang belum bisa perempuan kerjakan, salah satunya adalah polisi.¹³ Pada 1938, Mevrouw

Razoux Schultz¹⁴, seorang perempuan anggota *Volksraad* membicarakan mengenai perlunya polisi perempuan yang khusus menangani kasus-kasus yang melibatkan perempuan. Namun Ani Idrus mengkritisi apa yang dikemukakan olehnya. Ani Idrus menganggap bahwa perempuan di Timur berbeda dengan di Barat.

Perempuan hendaknya mengerjakan pekerjaan yang cocok untuk mereka.¹⁵ Pekerjaan yang dilakukan Ani Idrus pada saat itu adalah sebagai jurnalis dan penulis di surat kabar. Dalam tulisannya yang berjudul *Penulis Perempuan*¹⁶, Ia membenarkan pekerjaan tersebut cocok untuk dikerjakan perempuan. Namun tetap ada batasan-batasan yang tidak boleh dilanggar perempuan yang menjadi penulis.

Saat tulisan tersebut diterbitkan, jurnalis perempuan di Medan belum begitu banyak. Suatu waktu, organisasi Aisyiyah mengadakan muktamar di kota Medan pada tahun 1939, yang diperbolehkan mengikuti rangkaian acara muktamar tersebut sampai selesai hanya jurnalis perempuan meskipun pada pembukaannya tidak ada pelarangan. Surat kabar *Pewartu Deli*, yang saat itu dipimpin Adinegoro memerlukan seorang jurnalis perempuan untuk meliput acara tersebut, namun tidak ada jurnalis perempuan di *Pewartu Deli*, sehingga akhirnya dengan rekomendasi

¹¹ Ani Idrus. *Mode Barat dan Poetri Timoer di Sumatera Barat*. dalam *Seruan Kita* No. 31 Thn. 2, 23 february 1940, hlm. 698

¹² Ani Idrus beberapa kali dalam tulisannya menggunakan istilah *Timur* dan *Barat*. Timur dalam tulisannya mengacu pada Indonesia, sedangkan Barat mengacu pada negara-negara Eropa. Dualisme *Timur dan Barat* kemudian dibahas lebih lanjut oleh Edward Said dalam *Orientalisme : Mengganggu Hegemoni Barat dan Mendudukkan Timur sebagai Subjek*. (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010)

¹³ Lady Andy. *Polisi Perempuan*. *Sinar Deli*, 3 Oktober 1938

¹⁴ Mevrouw Razoux Schultz adalah anggota *Volksraad* yang peduli tentang perempuan. Beberapa kali ia berbicara di *Volksraad* tentang pekerjaan-pekerjaan yang juga harus melibatkan perempuan, misalnya polisi dan kondektur. Mevrouw Razoux Schultz cukup aktif di *Volksraad*. Ia memiliki nama asli Cornelia Hendrika Metzger. Elsbeth Locher-Scholten. *Oorspronkelijke versie opgenomen in: Biografisch Woordenboek van Nederland 5*. Den Haag. 2002. Lihat juga *Women and The Colonial State*.

¹⁵ Ani Idrus. *Perempuan dan Pekerjaannya*. Dalam *Seruan Kita* No. 15, 3 November 1939, hlm 352

¹⁶ Lady Andy, *Penulis Perempuan* dalam *Sinar Deli*, 13 Oktober 1938.

Matu Mona¹⁷, Ani Idrus menjadi jurnalis perempuan yang terpilih mewakili *Pewartu Deli* meliput acara muktamar tersebut.¹⁸

Selain jumlahnya yang sedikit, akses jurnalis-jurnalis perempuan tersebut juga terbatas. Jurnalis perempuan meskipun sudah mendapatkan kesempatan yang sama seperti jurnalis laki-laki, mereka masih juga dibatasi dengan norma-norma dalam masyarakat yang memaksa mereka untuk tidak bisa serta merta bersama jurnalis lelaki lainnya dalam setiap momen.¹⁹ Padahal, seorang jurnalis harus selalu siap dalam kondisi apapun. Dengan alasan norma dan pandangan masyarakat, perempuan-perempuan Indonesia akhirnya hanya dapat melakukan pekerjaan yang dalam pandangan masyarakat cocok dan baik serta menguntungkan bagi perempuan.²⁰

Ani Idrus mengetahui dengan pasti sulitnya bertahan di lingkungan yang selalu mendiskriminasi perempuan. Pengalamannya itulah yang banyak ia selipkan dalam tulisan-tulisannya. Sese kali Ani Idrus menyampaikan bahwa perempuan memang di bawah dominasi laki-laki, dan perempuan harus menyadari kelemahan-kelemahan yang ia miliki. Akan tetapi, dengan keterbatasan kekuatan atau hal lainnya, perempuan tetap punya hak untuk mengaktualisasikan dirinya. Ani Idrus menyadari bahwa perempuan mau tidak mau masih terikat adat dan tradisi,

¹⁷ Matu Mona adalah nama samaran yang digunakan oleh Hasbullah Parinduri. Ia adalah jurnalis yang bekerja di surat kabar *Pewartu Deli* pada awal 1930-an. Ani Idrus mengenal Matu Mona setelah ia bergabung bersama Indonesia Muda. Selain di *Pewartu Deli*, Matu Mona juga bekerja di harian *Penjedar*. Ia sempat terkena persidela karena tulisannya tentang tan Malaka. Ia menulis dua jilid buku dengan judul *Pacar Merah Indonesia*.

¹⁸ Tridah Bangun, *op.cit.*, hlm. 54

¹⁹ Lady Andy, *Penoelis Perempoean* dalam *Sinar Deli*, 13 Oktober 1938

²⁰ Ani Idrus. *Perempoean dan Pekerjaannya*. Dalam *Seruan Kita* No. 15, 3 November 1939, hlm 352

namun hal tersebut tidak serta merta menjadi penghalang perempuan untuk memajukan diri mereka.

Banyak hal yang dapat dilakukan perempuan tetapi tidak bisa dilakukan oleh laki-laki, seperti memasak dan mengurus rumah, keadaan tersebutlah yang seharusnya dimanfaatkan perempuan untuk menjadikan dirinya tidak lagi dianggap remeh oleh laki-laki. Perempuan punya pekerjaan mereka sendiri dan laki-laki juga punya pekerjaan mereka sendiri. Tidak harus perempuan bisa mengerjakan pekerjaan laki-laki atau sebaliknya, tetapi perempuan dan laki-laki harus bisa mengerjakan pekerjaan mereka masing-masing secara bersama-sama.²¹

Perkawinan dan Poligami

Meskipun perempuan telah merasakan dan menikmati modernitas, ada hal-hal yang memang tidak dapat dihindari perempuan pada saat itu, seperti menikah, menjadi istri dan hamil menjadi ibu yang merupakan kodrat bagi perempuan. Mengenai kodrat perempuan, Ani Idrus sangat menyadarinya, sehingga dalam beberapa tulisannya, Ani Idrus membahas mengenai hal tersebut.

Dalam tulisan-tulisannya, Ani Idrus menunjukkan pemikirannya yang cukup kolot, ia tidak sepenuhnya menjadi bagian dari penganut feminisme. Bisa dikatakan ia adalah feminis yang setengah-setengah. Dalam satu kesempatan, ia dengan jelas memosisikan perempuan. Namun cara pikirnya itulah yang menunjukkan ketegasan sikap Ani Idrus yang membatasi dirinya untuk tidak mengikuti nilai-nilai Barat yang tidak sesuai dan mempertahankan adat dan tradisinya. Meskipun terkadang adat dan tradisi yang dipertahankannya mendiskriminasi perempuan. Contohnya dalam urusan

²¹ Ani Idrus. *Perempoean dan Pekerjaannya*. Dalam *Seruan Kita* No. 15, 3 November 1939, hlm 352

perkawinan, dalam masyarakat Minangkabau konsep perkawinan cukup rumit. Perkawinan tidak hanya masalah sepasang insan yang membentuk keluarga atau rumah tangga saja, melainkan persoalan dan urusan kaum kerabat. Mulai dari mencari pasangan, membuat persetujuan, pertunangan, perkawinan, bahkan sampai segala urusan akibat perkawinan.²² Jika perkawinan dilakukan tidak mengikuti aturan-aturan tersebut, maka akan terjadi masalah.²³ Namun yang demikian itu tidak menjadi alasan bagi perempuan untuk tidak menikah.

Pengalaman masa kecil Ani Idrus yang melihat rusaknya hubungan rumah tangga kedua orang tuanya tidak menjadikan ia pribadi yang anti dengan perkawinan. Pemahaman Islam yang dimilikinya menguatkannya untuk tetap menikah, karena menikah sama dengan menyempurnakan setengah agamanya. Bukan hanya itu, dalam tulisannya yang lain juga Ani Idrus mengatakan bahwa :

*“Tiap-tiap poeteri ingin berroemah tangga sendiri dan tiap-tiap poeteri ingin mendjadi seorang iboe”.*²⁴

*“Dan..... berbahagialah gadis jang telah faham dengan soal roemah tangga dan sanggoep mengerdjakan pekerdjaannya sebagai seorang perempoean.”*²⁵

²² A.A. Navis, *Alam Takambang Jadi Guru : Adat dan Kebudayaan Minangkabau* (Jakarta : PT. Grafiti Pers, 1986), hlm. 193

²³ Ani Idrus. *Gara-Gara Tjinta*. Dalam *Sinar Deli*, 23 September 1938. Dalam artikel tersebut dijelaskan Ani Idrus mengenai konflik antara seorang laki-laki dengan keluarganya. Hal tersebut terjadi karena laki-laki tersebut menikah dengan perempuan yang dicintainya tanpa persetujuan keluarga.

²⁴ Ani Idrus. *Hidoep Vrijezel (lin)*. Dalam *Seruan Kita* No. 12 Thn. 1, 13 Oktober 1939

²⁵ Ani Idrus. *Poetri dan Roemah Tangga*, dalam *Seruan Kita* 13 Desember 1939, hlm. 480

Melalui tulisannya tersebut, Ani Idrus memahami bahwa keinginan untuk menikah dan menjadi ibu dimiliki oleh setiap perempuan tanpa terkecuali. Ani Idrus menganggap bahwa perempuan yang tidak atau belum menikah adalah perempuan yang tidak atau belum beruntung. Baginya rumah tangga dan keluarga adalah anugerah dan surga.²⁶ Menikah adalah kebahagiaan terbesar bagi seorang anak gadis. Ani Idrus juga menuliskan bahwa “Rumah tangga adalah mahkota perempuan”²⁷. Melalui pernyataannya tersebut Ani Idrus ingin menyampaikan bahwa perempuan benar-benar menjadi perempuan setelah menikah. Setelah menikah perempuan memiliki pasangan untuk berbagi. Walaupun demikian, tidak sedikit juga perempuan yang memilih untuk tidak menikah karena berbagai alasan.²⁸

Peristiwa menarik terjadi di Sumatera Barat, kampung halaman Ani Idrus pada akhir 1930-an. Dalam surat kabar lokal di Minangkabau, *Soeara Minangkabau* ditulis mengenai masalah bertambahnya anak gadis berusia di atas 20 tahun yang belum menikah. Hal tersebut terjadi pada gadis-gadis terpelajar, keluaran sekolah guru, baik dari sekolah Diniyah maupun MULO. Mereka terlalu selektif karena ketakutan mereka jika bersuamikan laki-laki yang melakukan kebiasaan

²⁶ Ani Idrus. *Mahkota Perempuan*. Dalam *Penjedar* No. 14, 6 November 1938, hlm.11

²⁷ Ani Idrus. *Mahkota Perempuan*. Dalam *Penjedar* No. 14, 6 November 1938, hlm.11

²⁸ Dalam masyarakat Minangkabau, kebanyakan gadis yang memutuskan untuk tidak menikah berasal dari golongan terpelajar. Alasan mereka tidak menikah adalah ketakutan mereka terhadap poligami. Alasan lain adalah tuntutan kerja, gadis-gadis terpelajar lulusan sekolah guru pergi merantau menjadi guru sekolah-sekolah rendah di daerah Sumatera; Tapanuli, Bengkulu, Palembang dan Medan. Lihat Jeffrey Hadler, *Sengketa Tiada Putus : Matriarkat, reformisme islam dan Kolonialisme di Minangkabau*. (Jakarta : Freedom, 2010), hlm. 258

poligami.²⁹ Ani Idrus yang berdarah Minangkabau menanggapi permasalahan tersebut dengan menuliskan artikel tentang *Hidoep Vrijgezel (lin)* dalam *Seruan Kita*. Dalam tulisannya tersebut Ani Idrus membahas tentang sebagian dari perempuan-perempuan Minangkabau yang terlambat menikah, bahkan memilih untuk tidak menikah. Mereka memang berhak memilih untuk tidak menikah, namun hal tersebut bertentangan dengan agama, adat dan budaya dalam masyarakat Minangkabau. Perempuan yang tidak menikah akan dianggap sebagai aib untuk kelompok masyarakat tempat tinggalnya.

Senada dengan tulisannya mengenai *Hidoep Vrijgezel (lin)*, dalam tulisannya yang lain, *Gambar Masyarakat Poeteri*³⁰ Ani Idrus juga membahas tentang seorang gadis berusia tiga puluh tahun yang belum menikah. Ani Idrus menganggap bahwa usia ideal perempuan menikah adalah usia dua puluhan, ketika seorang perempuan sudah mencapai usia tiga puluhan diibaratkan seperti setangkai bunga yang hampir gugur. Sikap dan cara pandang Ani Idrus yang seperti itu sangat mungkin membuat orang menganggapnya sebagai pendukung perkawinan usia muda yang sering terjadi di Sumatera Barat.

Dalam masyarakat Minangkabau, perempuan yang tidak menikah dianggap tidak sesuai dengan adat dan agama, dan terkadang mendapat cemooh dengan kata “apa guna?”.³¹ Hal tersebut yang menyebabkan perkawinan dalam masyarakat Minangkabau tidak selalu timbul dari ikrar pasangan, tetapi hasil kompromi banyak pihak—keterlibatan orang

lain sangat besar. Ini tercermin dalam pepatah Minangkabau: nikah dengan istri; kawin dengan keluarga; dan pulang *semenda* pada orang kampung.³² Ini menunjukkan bahwa perkawinan menjadi suatu keharusan bagi perempuan Minangkabau tanpa terkecuali meskipun angka poligami cukup tinggi.

Poligami adalah persoalan besar yang sulit untuk diselesaikan, hal tersebut menjadi persoalan yang sudah muncul sejak lama. Pidato beberapa orang perempuan yang berpartisipasi dalam Kongres Perempuan pertama pada Desember 1928 membahas masalah tersebut.³³ Masalah poligami tidak lagi hanya menjadi persoalan kecil antara pasangan suami istri, hal ini juga menjadi permasalahan besar di dalam masyarakat.

Beberapa organisasi perempuan di Indonesia yang terbentuk setelah Kongres Perempuan Pertama secara periodik melakukan pertemuan-pertemuan yang membahas masalah-masalah yang dihadapi kaum perempuan.³⁴ Persoalan poligami tidak pernah absen sebagai masalah yang dibahas.

Organisasi-organisasi perempuan yang berbasis Islam tidak menolak poligami, asalkan

³² Azmi, dkk., *Adat dan upacara Perkawinan Daerah Sumatera Barat*, (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, 1970), hlm. 48

³³ Dalam Kongres Perempuan Pertama, yang diadakan di Yogyakarta tersebut ada lebih dari 15 perempuan yang sudah mempersiapkan pidatonya. Masing-masing dengan judul dan tema yang berbeda dan ada juga yang mengangkat permasalahan yang sama. Salah satu dari mereka yang mengangkat masalah poligami, yaitu Tien Sastrowirjo. Susan Blackburn. *Kongres Perempuan Pertama, Tinjauan Ulang*. (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2007), hlm. 200

³⁴ Setelah Kongres Perempuan Pertama 1928, terbentuklah Perikatan Perempuan Indonesia (PPI), yang kemudian berubah nama menjadi Perikatan Perhimpunan Istri Indonesia (PPII) pada 1929. Dalam perkumpulan tersebut, terhimpun organisasi-organisasi perempuan dari berbagai daerah yang berbasis Islam dan Non-Religius, seperti Istri Sedar, Aisjijah, Sarekat Istri Jakarta, Istri Indonesia. Cora Vreede-de Stuers. *Op.cit*, hlm. 133-138

²⁹ “Perkawinan”, *Soeara Minangkabau*. Tahun ke-II, 5 Mei 1939, hlm. 103-106

³⁰ Ani Idrus. *Gambar Masyarakat Poeteri*, dalam *Seruan Kita* November 1939

³¹ Edwin M. Loeb. *Sumatra : Sejarah dan Masyarakatnya*. (Yogyakarta : penerbit Ombak : 2013), hlm. 135

dalam prakteknya tidak merugikan perempuan. Namun organisasi perempuan yang tidak berbasis agama secara tegas menolak praktik poligami.³⁵ Poligami adalah bentuk kejahatan pada perempuan. Perempuan mempunyai hak atas keadilan dan kebebasan, dan poligami adalah penyangkalan terhadap keadilan dan kebebasan perempuan.³⁶

Sumatera Barat, kampung halaman Ani Idrus menjadi tempat yang persentase poligaminya paling tinggi hingga tahun 1930.³⁷ Poligami sudah melekat bagi laki-laki Minangkabau seperti menjadi bagian dari kebiasaan. Hal tersebut menarik perhatian pemerintah kolonial Belanda, dan menjadi permasalahan yang mereka anggap meresahkan dan harus diselesaikan. Untuk menanggulangi masalah poligami tersebut, pemerintah kolonial Belanda mencanangkan ordonansi nikah (Undang-undang Perkawinan) pada tahun 1937. Terjadi pro dan kontra terhadap ordonansi pernikahan tersebut.³⁸

Ani Idrus tidak mengkritisi permasalahan poligami secara langsung dalam tulisan-tulisannya. Meskipun pengalaman pahit poligami yang diterima ibunya menjadi kenyataan yang menyakitkan, Ani Idrus masih

bisa menerima masalah poligami dengan alasan agama, tidak alasan lain. Wacana poligami kemudian menjadi wacana yang dibahas dalam majalah wanita yang ia terbitkan melengkapi wacana tentang kedudukan perempuan, kemajuan, serta hak dan kewajiban perempuan di Indonesia dan dunia.

Persoalan poligami jadi persoalan yang tidak selesai dari masa ke masa. Perlawanan yang dilakukan organisasi-organisasi pergerakan perempuan terhadap isu poligami terus dilakukan, namun tidak menemukan titik akhir. Beragam pandangan terus bermunculan. Bahkan setelah Indonesia merdeka, persoalan poligami tidak surut. Pada saat itu, Sukarno sendiri mencoba menjembatani persoalan poligami dengan menulis Sarinah. Dalam buku ini, ia berpendapat bahwa laki-laki dan perempuan pada prinsipnya sama. Secara politik Sukarno juga menyinggung bahwa laki-laki dan perempuan adalah alat revolusi. Sukarno berpendapat bahwa mereka membutuhkan tali sekse biologis dan jiwa sebagai modal kesatuan. Karena itulah, perempuan menjadi kekuatan. Maju dan mundur negara, bergantung pada perempuan. Lebih jelas dikatakan, “Perempuan adalah tiang negara.”³⁹ Pandangan Sukarno ini menjadi penguat kesetaraan laki-laki dan perempuan, termasuk senjata melawan poligami. Sayangnya pandangan tersebut berubah berubah, ketika pada 1954 Sukarno berpoligami dengan menikahi Hartini.⁴⁰

Perempuan Indonesia dibuat gempar. Organisasi perempuan mengkritik Sukarno ketika Fatmawati pergi meninggalkan istana. Menurut keterangan Saskia Wieringa, kepergian Fatmawati dari istana, juga didukung

³⁵ Organisasi perempuan yang berbasis Islam dan nonreligius memiliki perbedaan pandangan tentang poligami. Kongres Aisijah di Bukit Tinggi, mendukung poligami, sedangkan Kongres Istri Sedar di Jakarta, menolak poligami. Kongres kedua organisasi perempuan tersebut dilakukan pada tahun 1932. *Ibid*, hlm. 161

³⁶ Pernyataan Soearni Pringgogido, dalam tulisannya “Soal Polygamie”. *ibid*, hlm 162

³⁷ Laki-laki Minangkabau yang melakukan poligami mencapai angka 8,7% sedangkan Jawa dan Madura hanya 1,9% dan pulau-pulau luar sebanyak 4%. *ibid*, hlm 158

³⁸ Wannofry Samry dan Rahilah Omar. *Gagasan dan Aktiviti Wartawan Wanita Minangkabau Pada Masa Kolonial Belanda*. Jebat : Malaysian Journal of History, Politics and Strategy, Vol-39, Desember 2012, hlm.29

³⁹ Sukarno, *Sarinah*, (Jakarta: Panitya, 1963), hlm. 20

⁴⁰ Arifin Suryo Nugroho. *Sribana-Sribini; Biografi Hartini Sukarno*, (Yogyakarta: Ombak, 2009)

oleh Perwari. Akibatnya, hubungan Sukarno dengan gerakan perempuan menjadi tegang.⁴¹ Sejak saat itu, pembicaraan mengenai poligami menjadi bias. Tuduhan miring juga dialamatkan kepada Gerwani yang lantang menentang poligami, tetapi diam melihat sikap Sukarno.

Suara-suara miring tentang Sukarno dan poligami, menjadi isu yang penting di tahun 1950-an. Pada saat perempuan sedang berjuang untuk melawan ketidakadilan poligami, Sukarno justru mengingkari. Ani Idrus yang juga mendukung perlawanan atas poligami terpaksa harus diam. Ia tidak memberikan reaksi saat tindakan poligami dilakukan oleh Soekarno. Ani Idrus tidak berbuat apa-apa karena ia adalah bagian dari organisasi Wanita Demokrat di bawah naungan PNI, yang dipimpin oleh Soekarno. Pada akhirnya pemikirannya harus terbentur dengan aliran politiknya dan sosok yang ia jadikan teladan.

Keadaan tersebut akhirnya membuat Ani Idrus mengingkari prinsipnya. Ia harus menerima kenyataan bahwa poligami adalah kemungkinan terburuk yang harus diterima perempuan yang menikah, termasuk dirinya. Setelah pengalaman ibunya, Ani Idrus pun akhirnya menjadi korban tindakan poligami. Ani Idrus memutuskan untuk berpisah dari suaminya, Moh. Said pada akhir tahun 1970-an.

Penutup

Ani Idrus dengan pemikirannya hadir dalam peristiwa-peristiwa sejarah yang terjadi di Medan. Melalui tulisannya Ani Idrus menghadirkan realitas kehidupan perempuan

dalam sejarah Indonesia, khususnya sejarah Sumatera. Ani Idrus berupaya menghadirkan wacana-wacana tersebut dalam media dan politik, yang kemudian memberikan pengaruh terhadap tumbuhnya kesadaran banyak orang, tidak hanya golongan perempuan, tetapi juga laki-laki. Hal tersebut menjadi pertanda baik dalam mewujudkan dan melanjutkan gerakan emansipasi perempuan yang diusung oleh Kartini dan perempuan lainnya sebelumnya. Perempuan tidak lagi harus dibatasi hak-haknya, perempuan tidak lagi dipandang sebelah mata dengan kelemahan dan ketidakmampuannya. Perempuan dan laki-laki punya peran, fungsi, hak dan kewajibannya masing-masing dalam masyarakat.

Daftar Bacaan

- “Perkawinan”, *Soeara Minangkabau*. Tahun ke-II, 5 Mei 1939
- A.A. Navis, *Alam Takambang Jadi Guru : Adat dan Kebudayaan Minangkabau* (Jakarta : PT. Grafiti Pers, 1986)
- Ani Idrus “Lady Andy”, *Penoelis Perempoean* dalam *Sinar Deli*, 13 Oktober 1938
- Ani Idrus, “Lady Andy”. *Polisi Perempoean*. *Sinar Deli*, 3 Oktober 1938
- Ani Idrus. *Gambar Masyarakat Poeteri*, dalam *Seruan Kita* November 1939
- Ani Idrus. *Gara-Gara Tjinta*. Dalam *Sinar Deli*, 23 September 1938
- Ani Idrus. *Hidoep Vrijgezel (lin)*. Dalam *Seruan Kita* No. 12 Thn. 1, 13 Oktober 1939
- Ani Idrus. *Kemodernan Perempuan Membawa Bencana?* *Seruan Kita* No. 37, Th.2, 5 April 1940
- Ani Idrus. *Mabkota Perempuan*. Dalam *Penjedar* No. 14, 6 November 1938
- Ani Idrus. *Mode Barat dan Poetri Timoer di Sumatera Barat*. Dalam *Seruan Kita* No. 31 Thn. 2, 23 Februari 1940

⁴¹ Saskia Eleonora Wieringa, *The Politization of Gender Realations in Indonesia Women's Movement and Gerwani until the New Order State*, terj. Hersri Setiawan, *Penghancuran Gerakan Perempuan di Indonesia*, (Jakarta: Garba Budaya, 1999), hlm. 241

- Ani Idrus. *Perempoean dan Pekerjaannya*. Dalam *Seruan Kita* No. 15, 3 November 1939
- Ani Idrus. *Poetri dan Roemah Tangga*, dalam *Seruan Kita* 13 Desember 1939
- Ani Idrus. *Poetri Zaman Sekarang*, dalam *Seruan Kita* 29 September 1939
- Arifin Suryo Nugroho. Srihana-Srihini; Biografi Hartini Sukarno, (Yogyakarta: Ombak, 2009)
- Azmi, dkk., *Adat dan upacara Perkawinan Daerah Sumatera Barat*, (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, 1970)
- Daniel Perret, *Kolonialisme dan Etnisitas, Batak dan Melayu di Sumatera Timur*. Terj. Saraswati Wardhany. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2010
- Edward Said, *Orientalisme : Menggugat Hegemoni Barat dan Mendudukan Timur sebagai Subjek*. (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010)
- Edwin M. Loeb. *Sumatra : Sejarah dan Masyarakatnya*. (Yogyakarta : penerbit Ombak : 2013)
- Elsbeth Locher-Scholten. *Oorspronkelijke versie opgenomen in: Biografisch Woordenboek van Nederland 5*. Den Haag. 2002.
- Harry A. Poeze (Ed.). 2008. *Di Negeri Penjajah: Orang Indonesia di Negeri Belanda 1600-1950* (terj.) Jakarta: KPG dan KITLV-Jakarta
- Jeffrey Hadler, *Sengketa Tiada Putus : Matriarkat, reformisme islam dan Kolonialisme di Minangkabau*. (Jakarta : Freedom, 2010)
- Robert van Neil, *Munculnya Elit Modern Indonesia*. (Jakarta : Pustaka Jaya. 2009)
- Sartono Kartodirdjo, *Pengantar Sejarah Indonesia Baru : Sejarah Pergerakan Nasional*. (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama. 1999). hlm. 50
- Saskia Eleonora Wieringa, *The Politization of Gender Realations in Indonesia Women's Movement and Gerwani until the New Order State*, terj. Hersri Setiawan, Penghancuran Gerakan Perempuan di Indonesia, (Jakarta: Garba Budaya, 1999)
- Sukarno, *Sarinah*, (Jakarta: Panitya, 1963)
- Susan Blackburn. *Kongres Perempuan Pertama, Tinjauan Ulang*. (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2007)
- Tridah Bangun. *Hajjah Ani Idrus : Tokoh Wartawati Indonesia*. (Jakarta : CV. Haji Masagung, 1990)
- Wannofry Samry dan Rahilah Omar. *Gagasan dan Aktiviti Wartawan Wanita Minangkabau Pada Masa Kolonial Belanda*. Jebat : Malaysian Journal of History, Politics and Strategy, Vol-39, Desember 2012